



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KALIMANTAN TENGAH

TENTANG

PEMBINAAN DAN PELAYANAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAN PEMASYARAKATAN PADA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 134/ 04 /PEM.2020

NOMOR : W17.HM.05.02-1062

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Lima** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, bertempat di Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hj. NURHIDAYAH** : Bupati Kotawaringin Barat, berkedudukan di Jalan Sutan Syahril Nomor 02 Pangkalan Bun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ILHAM DJAYA** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-32.KP 03.03 Tahun 2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan Adonis Samad Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** sebagai Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang bertanggungjawab dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Kepala instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu meningkatkan pelayanan di bidang hukum, perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- d. bahwa untuk mewujudkan suatu produk hukum yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat bagi warga Kabupaten Kotawaringin Barat, pembentukan produk hukum daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Hak Asasi Manusia, serta menampung kondisi khusus daerah;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Instrumen Hukum lainnya;
- f. bahwa warga binaan Pemasyarakatan pada Kabupaten Kotawaringin Barat perlu diberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi kehidupan sesudah menjalani masa hukuman (bebas), agar dapat berbaur dengan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama di bidang:
- a. hukum, yang terdiri atas fasilitasi pembentukan hukum dan instrumen hukum lainnya, penyuluhan hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum;
 - b. pelayanan hukum, yang terdiri atas pelayanan kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum;
 - c. perlindungan, pemenuhan, penghormatan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia; dan
 - d. pemasyarakatan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman adalah:
- a. meningkatkan kualitas substansi dan koordinasi Pembentukan Produk Hukum dan instrumen hukum lainnya di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. meningkatkan kesadaran hukum menuju terbentuknya masyarakat yang cerdas dan taat hukum;
 - c. meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk memperoleh pelayanan bantuan hukum;
 - d. meningkatkan pelayanan hukum;
 - e. meningkatkan perlindungan, pemenuhan, penghormatan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia;
 - f. meningkatkan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitas membangun kesejahteraan masyarakat; dan
 - g. meningkatkan Sumber Daya Manusia Warga Binaan Pemasyarakatan yang siap kerja.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. pembentukan rancangan peraturan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan;
- b. penyusunan instrumen hukum lainnya, meliputi :

5. menelaah gugatan/ permohonan konsep jawaban gugatan.
- c. mediasi dan konsultasi peraturan daerah atau hukum;
 - d. penyuluhan hukum, pembinaan dan pembentukan desa/kelurahan sadar hukum;
 - e. penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia;
 - f. jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - g. pelayanan kekayaan intelektual;
 - h. pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitas membangun kesejahteraan negara; dan
 - i. pelatihan kerja bagi warga binaan pemasyarakatan.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK KESATU** menunjuk atau menugaskan Bagian Hukum dan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan **PIHAK KEDUA** menunjuk dan/atau menugaskan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Divisi Pemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Setiap pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi digunakan sebagai masukan dalam perencanaan program kerja selanjutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan secara teknis dari Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MASA BERLAKU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

BAB V PEMBIAYAAN

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

BAB VII
LAIN - LAIN

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *Force Majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan Pemerintah di bidang Fiskal dan Moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak memungkinkan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
BUPATI
KOTAWARINGIN BARAT,



PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TENGAH,

